

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

William Heard Kilpatrick, tokoh penggerak pendidikan di Amerika pernah menyatakan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi sekolah-sekolah pada masa sekarang adalah persoalan moral. Bahkan reformasi akademis bergantung pada bagaimana kita mengedepankan karakter. Serupa dengan pernyataan Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26 menyampaikan bahwa mendidik seseorang hanya pada pikirannya saja dan tidak pada moralnya sama artinya mendidik seseorang yang berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat (Lickona, 2018). Hal yang perlu disadari bahwa tidak semua peserta didik dalam usia remaja dapat melalui proses pendewasaan dengan baik. Sebagian besar dari usia remaja terbilang belum berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan sehingga berujung pada timbulnya sikap yang menyimpang (Anjaswarni et al., 2019).

Usia remaja sangat rentan masalah psiko-sosial yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itulah ketika remaja tidak mendapatkan pendampingan positif dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendampingi terutama orang tua, maka berkemungkinan remaja bertindak asusila, amoral, dan dehumanis. Perilaku-perilaku ini kerap kali dijumpai di sekolah-sekolah. Terdapatnya peserta didik yang tidak berkenan diarahkan guru, melawan guru, dan menginginkan kebebasan dari aturan baku yang berlaku di sekolah. Serta mengapresiasi makna kebebasan tidak bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan deviasi seperti merokok, main *game* dan di warnet pada jam pelajaran, tawuran antar sekolah, pesta narkoba, pesta *seks*, minum-minuman keras, membolos sekolah dan kesemua hal tersebut merupakan akibat pengaruh negatif modernisasi yakni menurunnya kualitas moral manusia (Rahmatullah, 2021).

Meningkatnya persoalan moral dalam masyarakat mulai dari keserakahan dan ketidakjujuran hingga tindak kekerasan telah melahirkan sebuah konsensus

baru. Kini, dari seluruh pelosok negeri, mulai dari warga negara individual hingga organisasi-organisasi publik, dari kalangan liberal dan konservatif, memohon kepada sekolah untuk mengambil peran sebagai pengajar moral bagi anak-anak (Lickona, 2018). Pendidikan sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembang tatanan kehidupan manusia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk manusia agar mampu bersikap dan menentukan perilakunya sesuai dengan tingkat kedewasaan masing-masing. Jika seluruh jalur pendidikan dapat berjalan dengan optimal, tentu harapan dan cita-cita bersama akan terwujud, yaitu membangun kehidupan manusia yang berperadaban dan menjunjung tinggi moralitas kemuliaan manusia (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, berkaca pada polemik kenakalan remaja yang rentan dilakukan oleh peserta didik, maka sekolah menjadi salah satu institusi yang efektif dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Melalui pendidikan diharapkan terjadi transformasi yang dapat menumbuhkembangkan karakter positif, serta mengubah watak dari yang tidak baik menjadi baik. Ki Hajar Dewantara dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak (Nursalam, 2020). Kesuma dalam Nursalam (2022) menyampaikan bahwa pendidikan merupakan wahana utama untuk menumbuhkembangkan karakter yang baik. Disinilah pentingnya pendidikan karakter karena tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah atau setelah lulus dari sekolah.

Pada proses implementasinya, pengajaran moral atau pendidikan karakter di sekolah tidak terlepas dari berbagai respon peserta didik yang mengarah pada sikap menyimpang. Perilaku menyimpang pada satuan pendidikan dilatarbelakangi oleh tiga penyebab seperti: 1) kuatnya pengaruh budaya lingkungan yang kurang baik dan kurangnya pengawasan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang memungkinkan terjadinya tingkat kenakalan

dikalangan peserta didik; 2) semakin kuatnya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta unsur budaya luar yang cenderung negatif dan banyak diadopsi oleh peserta didik terutama media elektronik; 3) kurangnya mutu pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Pembelajaran saat ini masih banyak yang hanya berorientasi pada tujuan akhir yang ingin dicapai dalam bentuk karakter yang baik (Hidayat, 2019).

Sekolah sebagai bagian dari satuan pendidikan formal tentunya tidak dapat berupaya sendiri untuk mengubah suatu sistem pendidikan yang fokus pada pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik. Transformasi pada sistem pendidikan secara makro dan progresif tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai *stakeholder* pendidikan terutama bentuk-bentuk perhatian dari pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah telah menetapkan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita, dan salah satu isi agendanya adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu karakter merupakan salah satu persoalan yang benar-benar dianggap serius oleh pemerintah.

Arie Budhiman, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2015-2019) menyatakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya agenda prioritas, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; melakukan revolusi karakter bangsa; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) tersebut, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan bahwa visi Kemendikbud 2019 adalah terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Sembilan agenda prioritas Nawa Cita yang dimaksud yaitu: 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta 9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Hidayat, 2019).

Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK kembali menjadi agenda prioritas lembaga pendidikan formal di Indonesia setelah dirilisnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. PPK merupakan gerakan terfokus pada pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. Khusus untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat secara umum sebagai bagian dari amanah Gerakan Nasional Revolusi Mental (Munifah, 2020).

Pasal 2 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 berisikan muatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter seperti: 1) nilai-nilai religius; 2) jujur; 3) toleran; 4) disiplin; 5) bekerja keras; 6) kreatif; 7) mandiri; 8) demokratis; 9) rasa ingin tahu; 10) semangat kebangsaan; 11) cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 13) komunikatif; 14) cinta damai; 15) gemar membaca; 16) peduli lingkungan; 17) peduli sosial; dan 18) bertanggung jawab.

Kedelapan belas nilai ini merupakan perwujudan dari lima nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Kehadiran Kurikulum 2013 (K-13) berawal dari kerisauan akademik di mana sistem pendidikan yang diterapkan selama ini hanya sebatas pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan peserta didik. Namun pada K-13 tidak hanya mengejar target pada aspek pengetahuan belaka, tetapi juga karakter atau pembentukan karakter peserta didik menjadi dominan untuk dikembangkan terutama yang terkait dengan sikap melalui pengintegrasian aspek keterampilan dan pengetahuan. Keterangan ini menandakan bahwa K-13 telah mengakomodir pendidikan karakter yang dikembangkan dalam kompetensi inti yaitu kompetensi spiritual, dan kompetensi sosial yang dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada K-13 (Walidin, 2020: 1-2). Dari K-13, proses pembelajaran dirancang berdasarkan kompetensi dasar seperti KD 1, yaitu berorientasi membentuk peserta didik yang religius; KD 2, yaitu berorientasi membentuk sikap kemanusiaan dan sosial peserta didik agar peduli lingkungan; KD 3, yaitu berorientasi memperluas pengetahuan dan wawasan peserta didik; KD 4, yaitu berorientasi melatih keterampilan peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya menjadikan peserta didik menguasai kompetensi yang ditargetkan, namun dirancang juga untuk membentuk karakter peserta didik serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Mustoip, 2018).

Meskipun telah dirumuskan delapan belas nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan daerah yang

satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan (Nursalam, 2020). Oleh karena itu, masing-masing satuan pendidikan atau pada khususnya sekolah memiliki keleluasaan tersendiri dalam menghimpun setiap instrumen atau indikator nilai-nilai karakter yang akan diinternalisasikan di lingkungan sekolah.

Badan Pendidikan Kristen (BPK) PENABUR merupakan satuan pendidikan formal yang tersebar di sembilan belas kota/kabupaten di Indonesia. BPK PENABUR melalui program PKBN2K (Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kristiani) menjadi bagian esensial dalam membentuk karakter peserta didik. Tentunya muatan nilai-nilai yang dikembangkan dalam PKBN2K sebagai bagian dari pendidikan karakter difokuskan sejalan dengan misi BPK PENABUR, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Melalui PKBN2K, BPK PENABUR memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan lulusan dengan profil BEST, yang merupakan akronim dari *Be Tough* (menjadi tangguh), *Excel Worldwide* (berwawasan global), *Share with Society* (peduli sosial), dan *Trust in God* (percaya pada Tuhan).

Adapun tiga nilai utama yang dikembangkan dalam PKBN2K seperti rendah hati, kesetiaan, dan penguasaan diri. Beranjak dari tiga nilai utama ini kemudian dijabarkan dalam dua belas nilai instrumental seperti rendah hati, kebaikan, kesetiaan, kejujuran, ketekunan, ketaatan, keberanian, kepedulian, pengorbanan, penguasaan diri, sabar, dan murah hati. Kedua belas nilai instrumental kemudian dijabarkan ke dalam delapan belas indikator karakter PKBN2K seperti: 1) menghargai agama sesama; 2) mau menerima kritik; 3) memberi pertolongan; 4) melakukan tugas demi kebaikan dan kebenaran; 5) berkata benar; 6) menerima hanya yang menjadi haknya; 7) mengerjakan tugas secara terus menerus walau banyak rintangan; 8) tepat waktu; 9) taat pada peraturan; 10) mendengarkan dengan penuh perhatian; 11) menghibur orang lain; 12) memberi yang berharga; 13) bertindak tepat waktu dan dengan motif

yang tidak tercampur aduk; 14) bersikap baik dalam segala keadaan; 15) bersukacita dalam menghadapi kesulitan; 16) memaafkan orang yang menjengkelkan bahkan yang telah menyakiti; 17) melihat persoalan dari sudut pandang orang lain; 18) menerima hal yang baru (Modul PKBN2K: 2020).

Nilai-nilai PKBN2K merupakan nilai-nilai yang bersifat universal dengan segmen yang tidak terbatas pada satu kepercayaan tertentu. Meskipun nilai-nilai PKBN2K bukan merupakan turunan yang berdasar pada indikator pengembangan pendidikan karakter yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan PKBN2K merupakan pola pengembangan pendidikan karakter yang dikhususkan bagi sekolah-sekolah di bawah naungan BPK PENABUR. Pentingnya PKBN2K tidak sebatas untuk menjawab tuntutan pemerintah bagi satuan pendidikan dalam pengembangan pendidikan karakter. Akan tetapi, ada tujuan besar yang ingin dicapai oleh BPK PENABUR, yaitu melalui PKBN2K diharapkan dapat menghasilkan lulusan BPK PENABUR sebagai generasi muda Indonesia yang berkarakter BEST yaitu *Be Tough* (menjadi tangguh), *Excel Worldwide* (berwawasan global), *Share with Society* (peduli sesama), dan *Trust in God* (percaya kepada Tuhan).

Dalam aktualisasinya nilai-nilai PKBN2K dapat diimplementasikan dalam tiga basis seperti basis kelas, basis kultur, dan basis komunitas. Implementasi berbasis kelas berarti adanya internalisasi nilai-nilai PKBN2K selama kegiatan pembelajaran berlangsung, implementasi berbasis kultur berkaitan dengan menghidupkan budaya sekolah yang berkarakter melalui program-program sekolah yang relevan, dan implementasi berbasis komunitas dalam hal ini ialah membangun relasi dan kerja sama yang baik antara orang tua, gereja, lembaga sosial, dan atau komunitas lainnya yang relevan.

Pada praktiknya, selain BPK PENABUR, lembaga pendidikan Islam Al-Munawar juga melakukan transformasi menyeluruh dalam menghadapi tantangan persaingan pendidikan melalui pembelajaran integratif yaitu adanya integrasi pembelajaran sains dengan nilai-nilai Islam. Integrasi dapat dilakukan dengan mengembangkan model pembelajaran, bahan ajar, dan media ajar yang

mengintegrasikan nilai sains dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan karakter religius tidak sebatas diajarkan dalam pendidikan agama, melainkan penanaman nilai karakter yang diinternalisasikan melalui integrasi keilmuan (Munifah. 2020). Demikian halnya PKBN2K dapat diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran di kelas.

Pelajaran sejarah termasuk mata pelajaran yang sangat potensial dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral. Materi pelajaran sejarah yang kompleks mencakup semua lini kehidupan manusia, diyakini dapat memberi kontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Wilhelm Dilthey, sejarawan Jerman menyatakan *life only takes on a measure of transparency in the light of historical reason* (penjelasan sejarah dapat menjadi ukuran bertindak dalam kehidupan), hal ini berarti konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah semestinya dapat menjadi refleksi nilai-nilai moral yang tepat bagi peserta didik dalam bersikap dan mengambil keputusan. Pendekatan nilai dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah untuk mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa (Syarifah, 2020).

Berdasar pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar proses pembelajaran sejarah dalam K-13, pendidikan sejarah diartikan sebagai suatu proses internalisasi nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan kesejarahan. Secara rasional, sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun salah satu tujuan mata pelajaran sejarah dalam K-13 adalah mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa.

Internalisasi nilai-nilai dalam mata pelajaran sejarah, guru-guru pengampu mata pelajaran sejarah di SMA/MA dituntut mampu meyakinkan kepada peserta didik tentang pentingnya sejarah sebagai instrumen pendidikan karakter bangsa. Guru-guru pengampu sejarah dituntut memiliki perspektif kebangsaan,

mengembangkan *historical thinking* (pemikiran kesejarahan) untuk ditransformasikan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Permendikbud No. 59, 2014).

Peneliti melihat beberapa keunikan dari penelitian ini antara lain adalah 1) peneliti menilai bahwa PKBN2K bukan hanya sebatas program pengembangan pendidikan karakter belaka, melainkan suatu fenomena yang digarap dengan serius oleh sekolah-sekolah di bawah naungan BPK PENABUR mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia; 2) SMA BPK PENABUR BOGOR (Paledang) dan SMA Nasional Plus BPK PENABUR BOGOR (Sentul) menjadi dua unit sekolah jenjang SMA di bawah naungan BPK PENABUR BOGOR yang akan diteliti. Eduanya memiliki karakteristik akademik dan latar belakang peserta didik yang cukup berbeda. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengembangan PKBN2K terhadap kedua unit sekolah tersebut; 3) peneliti ingin mencari tahu bagaimana program PKBN2K dapat dijalankan khususnya bagi peserta didik yang non Kristiani.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, khusus penelitian ini fokus pada dua hal utama yaitu pertama, proses implementasi nilai-nilai PKBN2K yang diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah, dan kedua, bagaimana peran guru sejarah dalam menyiapkan lulusan dengan karakter BEST di lingkungan SMA BPK PENABUR BOGOR. Pada observasi awal, peneliti melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diteliti terkait bagaimana upaya SMA BPK PENABUR BOGOR dalam mengimplementasikan PKBN2K guna menyiapkan lulusan dengan karakter BEST. Peneliti menilai bahwa terdapat peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus karena adanya ketidaksesuaian karakter yang belum mencerminkan karakter BEST di lingkungan SMA BPK PENABUR BOGOR. Beranjak dari gambaran kondisi tersebut, peneliti hendak melihat, meneliti, dan mengkaji implementasi PKBN2K dalam pembelajaran sejarah guna membentuk karakter BEST bagi peserta didik di lingkungan SMA BPK PENABUR BOGOR.

B. Fokus Penelitian

Identifikasi masalah yang dijadikan fokus penelitian ini adalah implementasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani (PKBN2K) dalam pembelajaran sejarah khususnya di SMA BPK PENABUR BOGOR (Paledang), dan SMA Nasional Plus BPK PENABUR BOGOR (Sentul).

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PKBN2K dalam pembelajaran sejarah di SMA BPK PENABUR BOGOR ?
2. Bagaimana strategi guru sejarah dalam mencapai lulusan sesuai dengan karakter BEST di SMA BPK PENABUR BOGOR ?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh guru sejarah dalam mengimplementasikan nilai-nilai PKBN2K dalam pembelajaran sejarah?

D. State of The Art

Pada *state of the art* ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan ataupun panduan untuk penelitian yang hendak dilakukan sekaligus menjadi bahan perbandingan dalam menggarap penelitian ini. Melalui *state of the art* ini terdapat beberapa pilihan jurnal nasional dan internasional antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 State Of The Art

Tahun	Nama Penulis	Judul
2022	Aningsih, MS Zulela, Amos Neolaka, Vina Iasha, Bramianto Setiawan	How is The Education Character Implemented? The Case Study in Indonesian Elementary School
2020	Muslim, Warto, dan Djono	Implementasi Pembelajaran Sejarah dalam Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Toleransi dan Patriotisme Siswa

2020	Fandi Akhmad	Implementasi Pendidikan Karakter dalam Konsep Pendidikan Muhammadiyah
2020	Sulastri Rini Rindrayani	The Implementation of Character Education in Indonesia High School Curriculum Program
2019	Irwan Abdullah, Bambang Hidayana, Setiadi, Pande Made Kutaneegara, Agus Indiyanto.	Beyond School Reach: Character Education in Three Schools in Yogyakarta, Indonesia.
2018	Siswati, Cahyo Budi Utomo, Abdul Muntholib	Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA PGRI 1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018
2018	Risna Rogamelia	Integrasi Pendidikan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung)
2018	Rulianto, Febri Hartono	Pendidikan Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
2018	Johan Setiawan, Ranando Sofiyhan Hadi	Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Materi Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia
2016	Lusi Mekarwati	Christian Values – Based Character Education: A Case Study in Bandung

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap jurnal-jurnal yang ada, maka penulis menemukan kebaruan dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun kebaruan yang akan diteliti yaitu bagaimana proses implementasi dalam menghubungkan nilai-nilai karakter PKBN2K dalam pembelajaran sejarah di

kelas. Melalui proses penelitian ini, guru sejarah dan peserta didik akan menjadi objek penelitian. Penulis akan melihat bagaimana proses guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai PKBN2K sepanjang proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan juga bagaimana sikap peserta didik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai PKBN2K selama proses pembelajaran sejarah di kelas.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*